# MODEL-MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN FAKTOR-FAKTOR PENYERTANYA

Khoirul Umam

Universitas Hasyim Asy’ari (UNHASY) Tebuireng Jombang

[cakumam.71@gmail.com](mailto:cakumam.71@gmail.com)

**Abstract:** Islamic Religious Education (IRE) is a conscious effort aimed at guiding children so that they become true Muslims, firm faith, good deeds, and noble character, as well as useful to society, religion and the state. To achieve this goal a curriculum is needed. There are four curriculum development models that can be used for IRE, namely: (1) administrative model, (2) grass roots model, (3) Hilda Taba model, (4) Rogers model, and (5) Ralp Tyler model. Rogers’s curriculum development model is the most detailed and flexible model because it provides a ranking of four models from the simplest to the most perfect. There are a number of factors that accompany and follow curriculum development. Supporting factors include higher education, society, and value systems that develop in the community concerned. Moderate inhibiting factors are lack of time, lack of conformity of opinion both among fellow teachers and with principals and administrators, and the limitations of teacher skills and knowledge.

**Keywords:** *Curriculum Development, Islamic Religious Education, Co-Factors.*

## PENDAHULUAN

Menurut pendapat Muhaimin, Pendidikan Agama Islam (PAI) yang selama ini berlangsung tampak kurang *concern* terhadap persoalan tentang bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif menjadi makna dan nilai yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik untuk bergerak, berbuat, dan berperilaku secara kongkret agamis dalam kehidupan praksis sehari-hari.[[1]](#footnote-1)

Muhaimin selanjutnya menjelaskan, bahwa pelaksanaan pendidikan agama yang berlangsung di sekolah dapat dikatakan masih mengalami banyak kelemahan, bahkan dapat dikatakan masih gagal. Kegagalan ini disebabkan karena praktik pendidikannya hanya memperhatikan aspek kognitif semata dari pertumbuhan kesadaran nilai-nilai (agama), dan mengabaikan pembinaan aspek afektif dan kreatif-volitif, yakni kemauan dan tekad mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Akibatnya terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan pengalaman, antara genosis dan praksis dalam kehidupan nilai agama, atau dalam praktik pendidikan agama berubah menjadi pengajaran agama sehingga tidak mampu membentuk pribadi yang bermoral, padahal intisari dari pendidikan agama adalah pendidikan moral.[[2]](#footnote-2)

Jika diamati fenomena empirik yang ada, maka tampak bahwa saat ini terdapat banyak kasus kenakalan pelajar. Isu tindak kekerasan, premanisme, *white collar crime* (kejahatan kerah putih), konsumsi minuman keras, etika berlalu lintas, perubahan pola konsumsi makanan, kriminalitas yang semakin menjadi-jadi dan sebagainya, telah mewarnai halaman surat kabar dan media massa lainnya. Timbulnya kasus-kasus tersebut memang tidak semata-mata karena kegagalan PAI di sekolah yang lebih menekankan aspek kognitif, tetapi bagaimana semua itu dapat mendorong serta menggerakkan guru PAI untuk mencermati kembali dan mencari solusi lewat pengembangan pembelajaran PAI yang berorientasi pada pendidikan nilai (afektif).[[3]](#footnote-3)

PAI sebagai salah satu mata pelajaran yang mengandung muatan ajaran-ajaran Islam dan tatanan nilai hidup dan kehidupan Islami, perlu diupayakan melalui model pengembangan pendidikan agama yang baik agar dapat mempengaruhi pilihan, putusan, dan pengembangan kehidupan peserta didik. Karena itu, proses pendidikan yang dilakukan pendidik diarahkan untuk membekali anak didik pengetahuan, pemahaman, penghayatan pengamalan ajaran Islam. Dalam hal ini PAI harus menempatkan ajaran Islam sebagai suatu objek kajian yang melihat Islam sebagai sistem nilai dan sistem moral yang tidak hanya diketahui dan dipahami tetapi juga dirasakan serta dijadikan sebuah aksi dalam kehidupan anak didik.

Pemahaman tentang PAI di sekolah dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu PAI sebagai aktivitas dan PAI sebagai fenomena. PAI sebagai aktivitas berarti upaya yang secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan pandangan hidup (bagaimana orang menjalani dan memanfaatkan hidup dan kehidupannya), sikap hidup, dan keterampilan hidup baik yang bersifat manual (petunjuk praktis) maupun mental dan sikap sosial yang bernafaskan ajaran serta nilai-nilai Islam. Sedangkan sebagai fenomena adalah peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih dan/atau penciptaan suasana yang dampaknya adalah berkembangnya suatu pandangan hidup yang bernafaskan ajaran atau nilai Islami yang diwujudkan dalam sikap hidup serta keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa pihak.[[4]](#footnote-4)

Di dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab disebutkan bahwa pedoman kurikulum Madrasah 2013 mata Pelajaran PAI dan bahasa Arab sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku secara nasional pada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Selanjutnya pada Keputusan Menteri Agama nomor 207 tahun 2014 tentang kurikulum madrasah disebutkan pada diktum ketiga, bahwa kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab dan pada diktum keempat disebutkan bahwa KTSP 2006 dan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dan ketiga berlaku secara nasional pada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan dimulai pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015.

Implementasi Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan kedalam sejumlah peraturan antara lain peraturan pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam PP tersebut ditetapkan pula struktur KTSP, yakni kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Pemahamannya adalah pada tingkat satuan pendidikan, yaitu sekolah, harus dikembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Pentingnya kurikulum dikembangkan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Dalam realitas sejarahnya, pengembangan kurikulum PAI tersebut ternyata mengalami perubahan paradigma, walaupun dalam beberapa hal tertentu paradigma sebelumnya masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Hal ini dicermati dan fenomena berikut: (1) perubahan dari tekanan pada hafalan dan daya ingatan tentang teks-teks dari ajaran agama Islam serta disiplin mental spiritusl sebagaimana pengaruh dari timur tengah kepada pemahaman tujuan. Makna dan motivasi beragama Islam untuk mencapai tujuan pembelajaran PAI, (2) perubahan dari cara berpikir tekstual, normatif, dan absolut kepada cara berpikir historis empiris dan kontekstual dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama Islam, (3) perubahan dari tekanan pada produk atau hasil pemikiran keagamaan Islam daripada pendahulunya kepada proses metodologisnya sehingga menghasilkan produk tersebut, (4) perubahan dari pola pengembangan kurikulum PAI yang hanya mengandalkan pada para pakar dalam memilih dan menyusun isi kurikulum PAI ke arah keterlibatan yang luas dari para pakar, guru, peserta didik, masyarakat untuk mengidentifikasi tujuan PAI dan cara-cara mencapainya.

Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan degan baik, dengan tolok ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Tahapan manajemen kurikulum di sekolah dilakukan meliputi empat tahap. *Pertama*, tahap perencanaan yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: (a) analisis kebutuhan, (b) merumuskan dan menentukan desain kurikulum, (c) membuat rencana induk pengembangan, (d) pelaksanaan dan penilaian. *Kedua*, tahap pengembangan meliputi langkah-langkah berikut; (a) perumusan rasional dan dasar pemikiran, (b) perumusan visi misi dan tujuan, (c) penentuan struktur dan isi program, (d) pemilihan dan pengorgainasian materi, (e) pengorganisasian kegiatan pembelajaran, (f) pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar, dan (g) penentuan cara mengukur hasil belajar.[[5]](#footnote-5) *Ketiga*, tahap implementasi atau pelaksanaan, meliputi langkah-langkah; (a) penyusunan rencana dan program pembelajaran (silabus, RPP), (b) penjabaran materi (kedalaman dan keluasan) (c) penentuan strategi dan metode pembelajaran, (d) penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar *setting* lingkungan pembelajaran. Keempat, tahap penilaian, terutama dilakukan untuk melihat sejauhmana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian formatif maupun sumatif.

Paparan di atas memperlihatkan adanya masalah-masalah kurikulum PAI pada dinamika kurikulum di Indonesia dan masalah-masalah pengembangan kurikulum PAI. Dari sejumlah masalah tersebut, kajian ini sengaja berfokus pada masalah-masalah pengembangan kurikulum PAI, yaitu bagaimanakah model-model pengembangan kurikulum dan faktor-faktor penyertanya.

## PEMBAHASAN

Kajian ini berfokus model-model pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam **(**PAI). Akan tetapi sebelumnya perlu dipahami pengertian dan tujuan PAI. Pada akhir kajian penulis sengaja membahas faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan kurikulum untuk mempertajam pembahasan.

### Pengertian Pendidikan Agama Islam

Terdapat beberapa definisi pendidikan Agama Islam menurut para ahli. Menurut Zakiyah Daradjat, Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan melalui ajaran-ajaran Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan kepada siswa agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam yang telah diyakininya setelah menyeluruh serta menjadikannya sebagai pandangan hidup demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat kelak.[[6]](#footnote-6) Pada bagian lain Daradjat mendefinisikan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh serta pada akhirnya dapat menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.[[7]](#footnote-7)

Menurut Zuhairini, Pendidikan Agama Islam adalah usaha untuk membimbing ke arah pertumbuhan kepribadian siswa secara sistematis dan pragmatis supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam sehingga terjalin kebahagiaan di dunia dan akhirat.[[8]](#footnote-8)

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.[[9]](#footnote-9) Berkaitan dengan hal ini juga secara spesifik, dalam kurikulum 2004 dijelaskan bahwa: Pembelajaran Pendidikan Agama Islam diarahkan pada pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan pola hidup bersih dan sehat, berpikir secara logis, kritis kreatif inovatif, menjalankan hak dan kewajiban, berkarya dan memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab dan menjadikan ajaran agama sebagai landasan memecahkan masalah serta perilaku dalam kehidupan masyarakat.[[10]](#footnote-10)

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan serta penggunaan pengalaman yang dilakukan secara terencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan menurut Muhaimain, bahwa “Pembelajaran Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan Islam dari siswa, di samping itu membentuk kesalehan sosial. Dalam arti kualitas atau kesalehan pribadi itu diharapkan mampu memancar keluar dalam hubungan keseharian dengan manusia lainnya (bermasyarakat), baik yang seagama maupun yang tidak seagama, serta dalam berbangsa dan bernegara, sehingga terwujud persatuan dan kesatuan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan antar sesama manusia.[[11]](#footnote-11)

Sebagai pengembangan wawasan selanjutnya, Arifin menjelaskan ciri-ciri pendidikan agama Islam di antaranya sebagai berikut: (1) tujuan utamanya adalah pembinaan anak didik untuk bertauhid, (2) kurikulum disesuaikan dengan fitrah manusia, (3) kurikulum yang disajikan merupakan hasil pengujian materi dengan landasan al-Qur’an dan al-Sunnah, (4) mengarahkan minat dan bakat serta meningkatkan kemampuan akliah anak didik serta keterampilan yang akan diterapkan dalam kehidupan konkret, (5) pembinaan akhlak anak didik (6) kurikulum pendidikan Islam senantiasa relevan dengan perkembangan zaman.[[12]](#footnote-12)

Dalam Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 pasal 1 dan 2 ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.[[13]](#footnote-13)

Dari pengertian di atas, dalam rangka membangun dan mengembangkan potensi manusia Indonesia seutuhnya, dalam arti utuh jasmani dan rohani sesuai dengan amanah Pancasila dan UUD 1945, diperlukan adanya pelaksanaan pendidikan agama pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. menurut Zuhairini, adalag usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu peserta didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran agama.[[14]](#footnote-14) Pendidikan agama, menurut Zakiyah Daradjat, menyangkut manusia seutuhnya, ia tidak hanya membekali anak dengan pengetahuan agama atau mengembangkan intelektual anak saja, dan tidak hanya mengisi dan menyuburkan perasaan (*sentiment*) agama saja, tetapi ia menyangkut keseluruhan diri pribadi anak, mulai dari latihan-latihan amaliah sehari-hari, yang sesuai dengan ajaran agama, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam, serta manusia dengan dirinya sendiri.[[15]](#footnote-15)

### Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan PAI tidak hanya berorientasi pada aspek jasmaniyah tetapi juga intelektual serta emosional untuk menjadi manusia yang paripurna. Perilaku manusia hasil pendidikan Islam pada hakikatnya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Allah swt.[[16]](#footnote-16) Dalam konsep lain, inilah yang disebut pribadi muslim yang *kaffah* serta memiliki keimanan.

Secara operasional, tujuan umum pendidikan agama Islam adalah membimbing anak agar mereka menjadi muslim sejati, beriman teguh, beramal salih, dan berakhlak mulia serta berguna bagi masyarakat, agama, dan negara.[[17]](#footnote-17) Tujuan ini merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap orang yang melaksanakan pendidikan agama. Karena dalam mendidik agama yang perlu ditanamkan terlebih dahulu adalah keimanan yang teguh, sebab dengan adanya keimanan yang teguh itu maka akan menghasilkan ketaatan menjalankan kewajiban agama.

Selain itu tujuan pendidikan Islam juga untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, sebagaimana dalam al-Qur’an surat al-Baqarah [2] ayat 201 yang berbunyi:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ رَبَّنَا اَتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Dan di antara mereka ada yang berkata, Ya Tuhan kami berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka”.[[18]](#footnote-18)

Tujuan umum pendidikan agama tersebut dengan sendirinya tidak akan dapat dicapai dalam waktu sekaligus, tetapi membutuhkan proses atau membutuhkan waktu yang panjang dengan tahap-tahap tertentu; dan setiap yang dilalui itu juga mempunyai tujuan tertentu yang disebut dengan tujuan khusus. Sedang tujuan khusus pendidikan agama, menurut Zuhairini, adalah tujuan pendidikan agama pada setiap tahap (tingkat) yang dilalui, seperti tujuan pendidikan agama di SD, berbeda dengan tujuan pendidikan agama di sekolah menengah, dan berbeda pula di perguruan tinggi.[[19]](#footnote-19)

Konsep tujuan pendidikan agama Islam tidak boleh lepas dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri, yakni tujuan yang bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan dan berlaku umum, karena sesuai dengan konsep ketuhanan yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Tujuan tersebut terumus dalam istilah yang disebut *insan kamil* [[20]](#footnote-20) (manusia sempurna).

### Model-Model Pengembangan Kurikulim PAI

Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Rancangan ini disusun dengan maksud memberi pedoman kepada para pelaksana pendidikan dalam proses pembimbingan perkembangan siswa untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh siswa sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Demikian ini terdapat pula dalam kurikuluam PAI.

Pengembangan kurikulum sekolah, termasuk bagi PAI, memerlukan suatu model yang dijadikan landasan teoretis untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Model atau konstruksi merupakan ulasan teoretis tentang suatu konsepsi dasar. Dalam kegiatan pengembangan kurikulum, model merupakan ulasan teoretis tentang proses pengembangan kurikulum secara menyeluruh atau hanya merupakan ulasan tentang salah satu komponen kurikulum. Ada suatu model yang memberikan ulasan tentang keseluruhan proses kurikulum, tetapi ada pula yang hanya menekankan mekanisme pengembangan saja, dan itu pun hanya berupa uraian tentang pengembangan organisasinya.

Banyak model yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Pemilihan suatu model pengembangan kurikulum tidak hanya didasarkan atas kelebihan dan kebaikan-kebaikannya serta kemungkinan pencapaian hasil yang optimal tetapi juga perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan yang digunakan. Model pengembangan kurikulum dalam sistem pendidikan dan pengelolaan yang sifatnya sentralisasi berbeda dengan yang desentralisasi. Model pengembangan kurikulum yang sifatnya subjek akademis berbeda dengan kurikulum humanistik, teknologis, dan rekonstruksi sosial.[[21]](#footnote-21)

Model yang digunakan dalam proses pengembangan kurikulum dikemukakan oleh para ahli pendidikan mulai dari suatu model yang sederhana sampai dengan model yang paling komprehensif, di antaranya sebagai berikut.

#### Model Pengembangan Kurikulum Administratif

Model ini merupakan model yang paling lama dan paling banyak dikenal. Model ini diberi nama model administratif atau *line staff* karena inisiatif dan gagasan pengembangannya datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Dengan wewenang administrasinya, administrator pendidikan (apakah dirjen, direktur atau kepala kantor wilayah pendidikan dan kebudayaan) membentuk suatu komisi atau tim pengarah pengembangan kurikulum.

Model administratif sering pula disebut sebagai model garis dan staf atau dikatakan pula sebagai model dari atas ke bawah. Kegiatan pengembangan kurikulum dimulai dari pejabat pendidikan yang berwenang membentuk panitia pengarah, yang biasanya terdiri dari pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan staf pengajar. Panitia pengarah tersebut diberi tugas untuk merencanakan, memberikan pengarahan tentang garis besar kebijaksanaan, menyiapkan rumusan falsafah dan tujuan umum pendidikan.

Setelah kegiatan tersebut selesai, kemudian panitia menunjuk atau membentuk kelompok-kelompok kerja sesuai dengan keperluan yang para anggotanya biasanya terdiri dari staf pengajar dan spesialis kurikulum. Kelompok-kelompok kerja tersebut bertugas untuk menyusun tujuan-tujuan khusus pendidikan, garis besar pengajaran, dan kegiatan belajar. Hasil kerja kelompok tersebut direvisi oleh panitia pengarah dan kemudian dilakukan uji coba jika dipandang perlu, walau hal ini jarang dilakukan. Uji coba dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan kelayakan pelaksanaannya. Pelaksana uji coba rancangan kurikulum tersebut adalah sebuah komisi yang ditunjuk oleh para panitia pengarah yang para anggotanya sebagian besar terdiri dari pihak sekolah. Setelah penelitian uji coba selesai, panitia pengarah menelaah atau mengevaluasi sekali lagi rancangan kurikulum tersebut, baru kemudian memutuskan pelaksanaannya.

Pengembangan kurikulum model administratif tersebut menekankan kegiatannya pada orang-orang yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Berhubung pengarah kegiatan berasal dari atas ke bawah, pada dasarnya model ini mudah dilaksanakan pada negara yang menganut sistem sentralisasi dan negara yang kemampuan profesional tenaga pengajarnya masih rendah. Kelemahan model ini terletak pada kurang pekanya terhadap adanya perubahan masyarakat, di samping itu juga karena kurikulum ini biasanya bersifat seragam secara nasional. Sehingga kadang-kadang melupakan atau mengabaikan adanya kebutuhan dan kekhususan yang ada pada tiap daerah.[[22]](#footnote-22)

Dalam pelaksanaan kurikulum tersebut, selama tahun-tahun permulaan diperlukan pula adanya kegiatan monitoring, pengamatan dan pengawasan, serta bimbingan dalam pelaksanaannya. Setelah berjalan beberapa saat perlu juga diadakan suatu evaluas, untuk menilai baik validitas komponen-komponennya, prosedur pelaksanaan, maupun keberhasilannya. Penilaian menyeluruh dapat dilakukan oleh tim khusus sekolah yang bersangkutan. Hasil penilaian tersebut merupakan umpan balik, baik instansi pendidikan tingkat pusat, daerah, maupun sekolah.

#### Model Pengembangan Kurikulum dari Bawah (*Grass Roots*)

Model pengembangan kurikulum ini merupakan lawan dari model pertama. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum tidak datang dari atas tetapi dari bawah, yaitu guru-guru atau komponen sekolah. Jika pada model administratif kegiatan pengembangan kurikulum berasal dari atas, maka dalam model kedua ini inisiatifnya justru berasal dari bawah, yaitu pengajar yang merupakan para pelaksana kurikulum. Model ini berdasarkan pada anggapan bahwa penerapan suatu kurikulum akan lebih efektif jika para pelaksananya di sekolah sudah diikutsertakan sejak semula dalam kegiatan pengembangan kurikulum itu.[[23]](#footnote-23)

Pengembangan kurikulum dari bawah ini menuntut adanya kerja antarguru, antarsekolah secara baik, di samping harus ada juga kerjasama dengan pihak luar sekolah, khususnya wali murid dan masyarakat. Pada pelaksanaannya para administrator cukup memberikan bimbingan dan dorongan kepada para staf pengajar. Setelah penyelesaian tahap tertentu, biasanya diadakan lokakarya untuk membahas hasil yang telah dicapai, dan sebaliknya merencanakan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Pengikut lokakarya di samping para pengajar dan kepala sekolah, juga melibatkan orang tua dan anggota masyarakat, serta para konsultan dan para nara sumber lain.

Dalam pengembangan kurikulum yang bersifat *grass roots* seorang guru, sekelompok guru atau keseluruhan guru suatu sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum. Pengembangan atau penyempurnaan ini dapat berkenaan dengan suatu komponen kurikulum, satu atau beberapa bidang studi ataupun seluruh bidang studi dan seluruh komponen kurikulum. Menurut Sukmadinata, apabila kondisinya telah memungkinkan, baik dilihat dari kemampuan guru-guru, fasilitas, biaya maupun bahan-bahan kepustakaan, pengembangan kurikulum model *grass roots* akan lebih baik. Hal itu didasarkan atas pertimbangan bahwa guru adalah perencana, pelaksana, dan juga penyempurna dari pengajaran di kelasnya. Dialah yang paling tahu kebutuhan kelasnya, oleh karena itu dialah yang paling kompeten menyusun kurikulum bagi kelasnya.[[24]](#footnote-24)

Pandangan yang mendasari pengembangan kurikulum model ini adalah pengembangan kurikulum secara demokratis, yaitu yang berasal dari bawah. Keuntungan model ini adalah proses pengambilan keputusan terletak pada para pelaksana, mengikutsertakan berbagai pihak bawah khususnya para staf pengajar karena mereka yang tahu terhadap kondisi lapangan dan kemampuan siswa serta keinginan para orang tua murid di lingkungan sekolah tersebut.

#### Model Pengembangan Kurikulum Hilda Taba

Model pengembangan kurikulum yang ditemukan oleh Hilda Taba ini berbeda dengan cara yang lazim, yakni yang bersifat deduktif, karena caranya bersifat induktif. Itulah sebabnya model ini disebut model terbalik. Pengembangan kurikulum model ini diawali dengan melakukan percobaan, penyusunan teori, dan kemudian penerapannya, hal itu dimaksudkan untuk mempertemukan antara teori dan praktik serta menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan pada kurikulum yang terjadi tanpa percobaan.[[25]](#footnote-25) Ada lima langkah pengembangan kurikulum model Taba ini:[[26]](#footnote-26)

Langkah pertama, mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru-guru. Di dalam unit eksperimen ini diadakan studi yang seksama tentang hubungan antara teori dengan praktik. Perencanaan didasarkan atas teori yang kuat, dan pelaksanaan eksperimen di dalam kelas menghasilkan data-data untuk menguji landasan teori yang digunakan. Ada delapan langkah dalam kegiatan unit eksperimen ini: (1) mendignosis kebutuhan, (2) merumuskan tujuan-tujuan khusus, (3) memilih isi, (4) mengorganisasi isi, (5) memilih pengalaman belajar, (6) mengorganisasi pengalaman belajar, (7) mengevaluasi, dan (8) melihat konsekuensi dan keseimbangan.

Langkah kedua, menguji unit eksperimen. Meskipun unit eksperimen ini telah diuji dalam pelaksanaan di kelas eksperimen tetapi masih harus diuji di kelas-kelas atau tempat lain untuk mengetahui validitas dan kepraktisannya, serta menghimpun data bagi penyempurnaan. Inti dari langkah kedua ini adalah mengujicobakan kurikulum yang sudah dikembangkan untuk mengetahui kesahihan dan kelayakan dalam proses belajar mengajar sehingga menuntut para pengembang untuk menganalisis dan merevisi hasil uji coba dan kemudian mensosialisasikannya.

Langkah ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Dari langkah pengujian diperoleh beberapa data. Data tersebut digunakan untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan. Selain perbaikan dan penyempurnaan diadakan juga kegiatan konsolidasi, yaitu penarikan kesimpulan tentang hal-hal yang lebih bersifat umum yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas. Hal itu dilakukan, sebab meskipun suatu unit eksperimen telah cukup valid dan praktis pada suatu sekolah, belum tentu demikian juga pada sekolah yang lainnya. Untuk menguji pemberlakuannya pada daerah yang lebih luas perlu adanya kegiatan konsolidasi.

Langkah keempat, pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Jika dalam kegiatan penyempurnaan dan konsolidasi telah diperoleh sifatnya yang lebih menyeluruh atau berlaku lebih luas, maka hal itu masih harus dikaji oleh para ahli kurikulum dan para profesional kurikulum lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui konsep-konsep dasar atau landasan-landasan teori yang dipakai sudah masuk dan dipakai.

Langkah kelima, implementasi dan diseminasi, yaitu menerapkan kurikulum baru ini pada daerah atau sekolah-sekolah yang lebih luas. Di dalam langkah ini masalah dan kesulitan-kesulitan pelaksanaan tetap dihadapi, baik berkenaan dengan kesiapan guru-guru, fasilitas, alat dan bahan, maupun biaya.

Langkah-langkah di atas menunjukkan uraian yang jelas tentang pendapat Taba yang mempunyai ciri-ciri sistematis dan pendekatan yang logis terhadap pengembangan kurikulum. Taba secara tegas menempatkan kerasionalan atau tujuan kurikulum dalam rangkaian model kurikulum, meskipun dalam hal ini konsep Taba lebih luas daripada konsep Tyler. Pendekatannya lebih menitikberatkan pada anak didik yang muncul dari interaksinya dengan sekolah-sekolah di California. Selama bekerja dengan para pendidik, Taba menyadari bahwa mereka akan menjadi para pengembang kurikulum yang penting di masa mendatang dan suatu sistem model yang rasional akan berarti bagi mereka. Model kurikulum Tyler dan Taba dikategorikan ke dalam *Rational Model* atau *Objectives Model*.[[27]](#footnote-27)

#### Model Pengembangan Kurikulum Rogers

Menurut Rogers, manusia berada dalam proses perubahan (*becoming developing changing*), sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu ia membutuhkan orang lain untuk membantu memperlancar atau mempercepat perubahan tersebut. Pendidikan juga tidak lain merupakan upaya untuk membantu memperlancar dan mempercepat perubahan tersebut. Guru serta pendidik lainnya bukan memberi informasi apalagi penentu perkembangan anak, mereka hanyalah pendorong dan pemerlancar perkembangan anak.[[28]](#footnote-28)

Menurut Rogers kurikulum yang dikembangkan hendaknya dapat mengembangkan individu secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan dengan cara melatih diri berkomunikasi secara interpersonal. Langkah-langkahnya sebagai berikut:[[29]](#footnote-29)

1. Diadakannya kelompok untuk dapatnya hubungan interpersonal di tempat yang tidak sibuk. Di dalam penentuan target ini satu-satunya kriteria yang menjadi pegangan adalah adanya kesediaan dari pejabat pendidikan untuk turut serta dalam kegiatan kelompok yang intensif. Selama satu minggu para pejabat pendidikan/administrator melakukan kegiatan kelompok dalam suasana yang rileks, tidak formal.
2. Kurang lebih dalam satu minggu para peserta mengadakan saling bertukar pengalaman, di bawah pimpinan staf pengajar. Sama seperti yang dilakukan para pejabat pendidikan, guru juga turut serta dalam kegiatan kelompok. Keikutsertaan guru dalam kelompok tersebut sebaiknya bersifat sukarela, lama kegiatan kalau mungkin satu minggu lebih baik, tetapi dapat juga kurang dari satu minggu.
3. Kemudian diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi dalam satu sekolah, sehingga hubungan interpersonal akan menjadi lebih sempurna, yaitu hubungan antara guru dengan guru, guru dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik dalam suasana yang akrab. Langkah ketiga ini dalam rangka pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau satu unit pelajaran. Selama lima hari penuh siswa ikut serta dalam kegiatan kelompok, dengan fasilitator para guru atau administrator atau fasilitator dari luar.
4. Selanjutnya pertemuan diadakan dengan mengikutsertakan anggota yang lebih luas lagi, yaitu dengan mengikutsertakan para pegawai administrasi dengan orang tua peserta didik. Dalam situasi yang demikian diharapkan masing-masing person akan saling menghayati dan lebih akrab, sehingga memudahkan berbagai pemecahan problem sekolah yang dihadapi. Dalam langkah keempat ini partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Kegiatan ini dapat dikoordinasi oleh komite sekolah di masing-masing sekolah. Lama kegiatan kelompok dapat dilakukan tiga jam setiap sore selama satu minggu atau 24 jam secara terus-menerus. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya orang-orang dalam hubungannya dengan sesama orang tua, dengan anak, dan dengan guru. Rogers juga menyarankan, kalau mungkin ada pengalaman kegiatan kelompok yang bersifat campuran. Kegiatan merupakan kulminasi dari semua kegiatan kelompok di atas.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyusunan kurikulum akan lebih realistis, karena didasari oleh kenyataan yang ada di masyarakat dan merupakan masukan dari berbagai pihak.

Model yang dikemukakan oleh Rogers terutama akan berguna bagi para pengajar di sekolah atau di perguruan tinggi. Ada empat model yang dikemukakan oleh Rogers, dari model yang paling sederhana sampai dengan yang berikutnya, sebenarnya merupakan penyempurnaan terhadap model-model sebelumnya. Model-model tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:[[30]](#footnote-30)

##### Model I

Model ini sebagai model yang paling sederhana, menjelaskan bahwa pendidikan hanyalah meliputi informasi dan ujian. Model ini banyak digunakan oleh para tenaga pengajar, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Asumsi yang mendasari pemikiran model ini adalah:

1. Evaluasi adalah pendidikan dan pendidikan adalah evaluasi.
2. Pengetahuan merupakan akumulasi bagian-bagian dari materi dan informasi.

Kedua asumsi di atas dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Isi/Materi Pelajaran

Ujian/Evaluasi

Gambar 1. Alur Penyusunan Kurikulum Model I

Model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang umum dan bersifat tradisional, walaupun model ini tidak memadai tetapi minimal telah memberikan pertanyaan pokok, yaitu:

* + - * 1. Mengapa saya mengajarkan mata pelajaran itu?
        2. Bagaimana saya mengetahui keberhasilan dalam mengajar mata pelajaran itu?

Pertanyaan pertama berhubungan dengan isi mata pelajarandan pertanyaan kedua secara tidak langsung berkaitan dengan ujian/evaluasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipertimbangkan validitas dan signifikansi terhadap apa yang diajarkan, kebutuhan atas keseimbangan di antara luas dan kedalaman pelajaran, serta relevansinya yang berujung pada minat siswa terhadap isi/materi pelajaran.

Model I ini mengabaikan metode mengajar yang memungkinkan proses belajar mengajar dapat berlangsung secara bermakna. Urutan materi pelajaran, komulatif, dan hakikat hirarkhi. Dari beberapa pengetahuan dan pengenalan terhadap hubungan antara konsep-konsep harus dipertimbangkan juga. Aspek-aspek penting ini tidak akan diabaikan jika pertanyaan berikut ini dimunculkan:

1. Mengapa saya mengajarkan materi ini dengan cara atau metode tertentu?
2. Bagaimana saya mengorganisasi isi atau materi pelajaran ini?

Sehingga dengan belum munculnya kedua pertanyaan di atas menyebabkan model kedua dari Rogers muncul sebagai perbaikan dari model yang pertama

##### Model II

Model II ini dilakukan dengan menyempurnakan model I dengan menambahkan kedua jawaban pada pertanyaan (3 dan 4) tersebut, yaitu tentang metode dan organisasi bahan pelajaran. Dalam pengembangan kurikulum pada model II sudah dipikirkan pemilihan metode yang efektif bagi berlangsungnya proses pengajaran. Di samping itu, bahan pelajaran juga sudah disusun secara sistematis, dari yang mudah ke yang lebih sukar dan juga memperhatikan luas dan dalamnya suatu bahan pelajaran. Akan tetapi, model II belum memperhatikan masalah teknologi pendidikan yang sangat menunjang keberhasilan kegiatan pengajaran. Teknologi pendidikan yang dimaksud berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan:

1. Buku-buku pelajaran apakah yang harus dipergunakan dalam suatu mata pelajaran?
2. Alat atau media pengajaran apa yang dapat dipergunakan dalam mata pelajaran tertentu?

##### Model III

Dengan masih munculnya kedua pertanyaan di atas, maka muncul lagi model pengembangan kurikulum model III sebagaimana bagan di bawah ini, walaupun masih memerlukan pengembangan yang lebih lanjut.

Metode/Cara Mengajar

Teknologi Pendidikan

Organisasi Materi Pelajaran

Isi/Materi Pelajaran

Ujian/Evaluasi

Gambar 2. Alur Penyusunan Kurikulum Model II

Model III pengembangan kurikulum ini merupakan penyempurnaan model II yang belum dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan 5 dan 6, yaitu dengan memasukkan unsur teknologi pendidikan ke dalamnya. Menurut pendapat Ahmad, pengembangan kurikulum yang berorientasi pada bahan pelajaran hanya akan sampai pada model III. Padahal masih ada satu lagi masalah pokok yang harus diperhatikan, yaitu yang berkaitan dengan masalah tujuan.[[31]](#footnote-31)

##### Model IV

Model IV merupakan penyempurnaan model III, yaitu dengan memasukkan tujuan ke dalamnya. Tujuan itulah yang bersifat mengikat semua komponen yang lain, baik metode, organisasi bahan, teknologi pengajaran, isi pelajaran maupun kegiatan penilaian yang dilakukan.

Model III dari Rogers ini masih menyisakan satu pertanyaan pokok untuk mengembangkan kurikulum yang lebih sempurna. Adapun pertanyaan itu adalah: “Apa yang saya harapkan dari siswa yang harus mereka lakukan sebagai hasil pengajaran saya ini?” Pertanyaan ini merupakan suatu pertanyaan yang mendukung pada model pengembangan kurikulum yang lebih sempurna, yaitu model IV dengan komponen sebagai berikut.

Metode/Cara Mengajar

Teknologi Pendidikan

Organisasi Isi/ Materi Pelajaran

Tujuan /

Sasaran

Isi/Materi Pelajaran

Ujian/Evaluasi

Gambar 3. Alur Penyusunan Kurikulum Model IV

Model IV merupakan model pengembangan kurikulum yang sempurna, sebab tujuan atau sasaran pada model ini sebagai bagian dari salah satu komponennya. Tujuan ini sebenarnya akan membantu jawaban-jawaban terhadap semua pertanyaan. Tujuan atau sasaran harus menempati suatu posisi sentral dalam setiap model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum ini menunjukkan bahwa pengajaran, isi atau materi pelajaran dan organisasi materinya serta evaluasi atau ujian, semua terkait pada tujuan-tujuan yang telah diformulasikan secara jelas.

#### Model Pengembangan Kurikulum Ralp Tyler

Dalam bukunya yang berjudul *Basic Principle Curriculum and Inductions*, Tyler mengatakan bahwa *curriculum development needed to be treated logically and systematically*. Ia berupaya menjelaskan tentang pentingnya pendapat secara rasional, menganalisis, menginterpretasi kurikulum dan program pengajaran dari suatu lembaga pendidikan.[[32]](#footnote-32)

Lebih lanjut Tyler mengungkapkan bahwa untuk mengembangkan suatu kurikulum perlu menempatkan empat pertanyaan berikut:

1. *What educational purposes should the school seek to attain? (objectives)*
2. *What educational experiences are likely to attain these objectives? (instructional strategic and content)*
3. *How can these educational experiences be organized effectively? (organizing learning experiences)*
4. *How can we determine whether these purposes are being attains? (assessment and evaluation)*

Sebagai bapak (*father*) dari pada pengembang kurikulum (*curriculum development*), Tyler telah menanamkan perlunya hal lebih rasional, sistematis, dan pendekatan yang berarti dalam tugas mereka. Akan tetapi, karya Tyler atau pendapat Tyler sering dipandang rendah oleh beberapa penulis sesudahnya. Hal itu karena dalam hal menentukan *objectives model*, ia terkesan sangat kaku. Namun sebenarnya pandangan yang demikian tidak selalu benar, mengingat banyak karya atau tulisan Tyler yang telah salah diinterpretasi, dianalisis secara dangkal, dan bahkan cenderung menghindarinya. Tentu saja Tyler memiliki pengaruh yang kuat dan luas terhadap para pengembang kurikulum atau penulis kurikulum lainnya selama tiga dekade yang lalu. Secara jelas tentang model pengembangan kurikulum dapat dilihat pada gambar berikut.[[33]](#footnote-33)

|  |  |
| --- | --- |
| Objectives | *What educational purposes should the school seek to attain?* |
| **↓** |  |
| *Selecting Learningn Experiences* | *What educational experiences are likely to attain these objectives?* |
| **↓** |  |
| *Organizing Learning Experiences* | *How can these educational experiences be organized effectively?* |
| **↓** |  |
| Evaluation | *How can we determine whether these purposes are being attains?)* |

Gambar 4. Model Pengembangan Kurikulum

#### Model Pengembangan Kurikulum Sistem Beu’camp

Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Beu’camp seorang ahli kurikulum. Beu’camp mengemukakan lima hal di dalam suatu pengembangan kurikulum:[[34]](#footnote-34) *Pertama*, menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut, apakah suatu sekolah, kecamatan, kabupaten, propinsi, atapun seluruh daerah. Pentahapan arena ini ditentukan oleh wewenang yang dimiliki oleh pengambil kebijaksanaan dalam pengembangan kurikulum, serta oleh tujuan pengembangan kurikulum. Walaupun daerah yang menjadi wewenang kepala kanwil pendidikan dan kebudayaan mencakup suatu wilayah propinsi, tetapi arena pengembangan kurikulum hanya mencakup satu daerah kabupaten saja sebagai pilot proyek.

*Kedua,* menetapkan personalia, yaitu menetapkan siapa-siapa saja yang turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum. Ada empat kategori orang yang turut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, yaitu: (1) para ahli pendidikan/kurikulum yang ada pada pusat pengembangan kurikulum dan para ahli bidang ilmu dari luar, (2) para ahli pendidikan dari perguruan tinggi atau sekolah dan guru terpilih, (3) para profesional dalam sistem pendidikan, dan (4) profesional lain dan tokoh-tokoh masyarakat.

*Ketiga,* organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, memilih isi dan pengalaman belajar serta kegiatan evaluasi dan dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. Beu’camp membagi keseluruhan kegiatan ini dalam lima langkah, yaitu: (1) membentuk tim pengembang kurikulum, (2) mengadakan penilaian atau penelitian terhadap kurikulum yang ada yang sedang digunakan, (3) studi penjajakan tentang kemungkinan penyusunan kurikulum baru, (4) merumuskan kriteria-kriteria bagi penentuan kurikulum baru, dan (4) penulisan dan penyusunan kurikulum baru.

*Keempat,* implementasi kurikulum. Langkah ini merupakan langkah menerapkan atau melaksanakan kurikulum yang bukan sesuatu yang sederhana, sebab membutuhkan kesiapan yang menyeluruh baik kesiapan guru-guru, siswa, fasilitas, bahan maupun biaya, di samping kesiapan manajerial dari pimpinan sekolah atau administrator setempat.

*Kelima,* langkah ini merupakan langkah terakhir yaitu mengevaluasi kurikulum. Dalam langkah ini mencakup empat hal, yaitu: (1) evaluasi tentang pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru, (2) evaluasi desain kurikulum, (3) evaluasi belajar siswa, (4) evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum, data yang diperoleh dari hasil evaluasi ini digunakan bagi penyempurnaan sistem dan desain kurikulum serta prinsip-prinsip pelaksanaannya.

#### Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Kurikulum

##### Faktor-Faktor Pendukung Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh unsur-unsur kekuatan yang berada di masyarakat terutama dari perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai yang berkembang pada masyarakat yang bersangkutan. Hal ini penulis jelaskan sebagai berikut.

1. **Perguruan Tinggi**

Kurikulum minimal mendapat dua pengaruh dari perguruan tinggi. *Pertama*, dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. *Kedua*, dari pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru di Perguruan Tinggi Keguruan.[[35]](#footnote-35) Ilmu pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan pemikiran baik landasan dan konsep (teori) maupun landasan secara praktis bagi isi kurikulum dan pengembangannya. Beberapa ilmu pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan.

Kurikulum pendidikan tinggi keguruan sangat mempengaruhi kompetensi guru yang dihasilkannya. Kompetensi guru ini akan mempengaruhi pelaksanaan pengembangan kurikulum di sekolah.[[36]](#footnote-36) Penguasaan ilmu, baik ilmu pendidikan maupun bidang studi serta kemampuan mengajar dari guru-guru akan sangat mempengaruhi pengembangan dan implementasi kurikulum di sekolah. Guru-guru yang mengajar pada berbagai jenjang dan jenis sekolah yang ada dewasa ini umumnya disiapkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan.[[37]](#footnote-37)

1. **Masyarakat**

Sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan di masyarakat. Sebagai bagian dan agen dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dimana sekolah itu berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya.[[38]](#footnote-38)

Masyarakat yang ada di sekitar sekolah mungkin merupakan masyarakat homogen atau heterogen, masyarakat kota atau desa, petani, pedagang, pegawai, dan sebagainya. Sekolah harus melayani aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat mempengaruhi pengembangan kurikulum. Sekolah bukan hanya mempersiapkan peserta didik untuk hidup, tetapi juga untuk bekerja dan berusaha. Jenis pekerjaan dan perusahaan yang ada di masyarakat menuntut persiapannya di sekolah.[[39]](#footnote-39)

1. **Sistem Nilai**

Dalam kehidupan masyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, nilai sosial, maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat bertanggungjawab dalam pemeliharaan dan penerusan nilai-nilai yang berkembang. Sistem nilai yang dipelihara dan akan diteruskan tersebut harus terintegrasi dalam kurikulum.[[40]](#footnote-40)

Masalah utama yang dihadapi oleh pengembang kurikulum dalam menghadapi sistem nilai ini adalah bahwa dalam masyarakat nilai itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen dan multifaset. Masyarakat memiliki kelompok-kelompok etnis, kelompok vokasional, kelompok intelek, kelompok sosial, spiritual, dan sebagainya yang tiap kelompok sering memiliki nilai yang berbeda. Dalam masyarakat juga terdapat aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, fisik, estetika, etika, religius, dan sebagainya. Aspek-aspek tersebut sering juga mengandung nilai-nilai yang berbeda.

Ada lima hal yang hrus diperhatikan guru dalam mengajarkan nilai: (1) guru hendaknya mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat, (2) guru hendaknya berpegang pada prinsip demokrasi, etis, dan moral, (3) guru berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru, (4) guru menghargai nilai-nilai kelompok lain, dan (5) guru memahami dan menerima keragaman kebudayaan sendiri. [[41]](#footnote-41)

##### Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Kurikulum

Segala macam kegiatan/organisasi apapun pasti ada tantangan dan hambatan yang selalu menyertai kegiatan itu, baik itu berupa tantangan dan hambatan yang ringan maupun yang berat. Sekalipun kecil dan ringannya hambatan itu apabila kita menganggap enteng dan remeh tanpa ada solusi yang logis untuk mengatasinya akan menjadi besar dan berat. Akhirnya kegiatan tersebut dapat menjadi gagal dan tidak mendapatkan keuntungan (*unhappy ending*).

Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan. Hambatan pertama terletak pada guru. Guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal: *Pertama*, kurang waktu. Selama ini banyak guru di samping berprofesi sebagai tenaga pengajar juga mempunyai pekerjaan sampingan di luar profesinya itu. Pekerjaan sampingan ini terpaksa dilakukan oleh seorang guru dengan alasan untuk memenuhi beban biaya kebutuhan hidup keluarganya, sehingga dengan profesi sampingannya ini seorang guru tidak punya banyak waktu untuk berpikir dan fokus terhadap profesinya sebagai tenaga pengajar yang seharusnya seorang guru memfokuskan terhadap materi pengajaran dan mengolah kurikulum serta mengembangkannya. Diharapkan dengan adanya program pemerintah yang dikemas dengan sertifikasi guru dan disertai dengan peningkatan kesejahteraan guru, kebutuhan keluarga seorang guru dapat terpenuhi dan berkonsentrasi terhadap profesinya sebagai tenaga pendidik. Dengan kata lain, tidak ada seorang guru pun yang melakukan pekerjaan sampingan lagi.

*Kedua,* kekurangsesuaian pendapat baik antara sesama guru maupun dengan kepala sekolah dan administrator. Perbedaan pengalaman dan disiplin ilmu yang mereka tekuni menyebabkan terjadinya beda pendapat sehingga bila perbedaan ini tidak dapat disatukan/dipertemukan, sulit bagi suatu lembaga untuk melakukan pengembangan kurikulum.

*Ketiga,* keterbatasan kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri. Kemampuan keilmuan dari masing-masing guru, kepala sekolah, administrator berbeda dan terbatas. Sumber daya manusia di suatu lembaga menjadi faktor utama dalam kemajuan lembaga tersebut. Jika SDM-nya rendah, maka sulit bagi lembaga tersebut untuk maju dan mengembangkan lembaganya. Salah satu faktor yang menghambat pengembangan kurikulum adalah keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini terjadi pada saat pemerintah memberikan wewenang kepada semua lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri sesuai dengan kebutuhan lingkungannya yang banyak terjadi adalah ketidakmampuan SDM-nya.

Hambatan lain datang dari masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum dibutuhkan dukungan masyarakat baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. Masyarakat adalah sumber *input* dari sekolah. Keberhasilan pendidikan, ketetapan kurikulum yang digunakan membutuhkan bantuan, serta input fakta dan pemikiran dari masyarakat.[[42]](#footnote-42) Jika suatu lembaga tidak tanggap dan kurang memberdayakan masyarakat maka lembaga tersebut bersiap-siaplah untuk gulung tikar, dalam artian akan ditinggalkan oleh masyarakat.

Hambatan lain yang dihadapi oleh pengembang kurikulum adalah masalah biaya. Untuk pengembangan kurikulum, apalagi yang berbentuk kegiatan eksperimen, baik metode, isi, atau sistem secara keseluruhan membutuhkan biaya yang sering tidak sedikit. Harapan dari pengelola pendidikan dengan terealisasinya anggaran pendidikan 20% kebutuhan pembiayaan pendidikan dapat terpenuhi dengan baik.

## PENUTUP

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah usaha sadar untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Islam dari peserta didik, dan untuk membentuk kesalehan sosial. PAI bertujuan membimbing anak agar mereka menjadi orang muslim sejati, beriman teguh, beramal salih, dan berakhlak mulia, serta berguna bagi masyarakat, agama dan negara. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan kurikulum.

Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh siswa sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pengembangan kurikulum bagi PAI memerlukan suatu model yang dijadikan landasan teoretis untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Model atau konstruksi merupakan ulasan teoretis tentang suatu konsepsi dasar. Pengembangan kurikulum diperlukan oleh PAI terutama terkait dengan ciri-cirinya yang mengarahkan minat dan bakat serta meningkatkan kemampuan akliah dan keterampilan yang akan diterapkan dalam kehidupan konkret peserta didik, pembinaan akhlak peserta didik, dan senantiasa relevan dengan perkembangan zaman.

Ada lima model pengembangan kurikulum yang dapat digunakan untuk PAI, yaitu: (1) model administratif, (2) model dari bawah (*grass roots*), (3) model Hilda Taba, (4) model Rogers, dan (5) model Ralp Tyler. Model pengembangan kurikulum Rogers merupakan model yang paling rinci dan fleksibel karena menyediakan peringkat empat model dari peringkat yang paling sederhana sampai yang paling sempurna.

Ada sejumlah faktor yang menyertai dan menyekitari pengembangan kurikulum. Faktor-faktor pendukungnya meliputi perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai yang berkembang pada masyarakat yang bersangkutan. Sedang Faktor-faktor penghambatnya adalah kurang waktu, kekurangsesuaian pendapat baik antara sesama guru maupun dengan kepala sekolah dan administrator, dan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan guru.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, H.M. dkk. 1998. *Pengembangan Kurikulum di Perguruan Tinggi.* Bandung: Pustaka Setia

Ali>, Sa*‘*i>d Isma>*‘*i>l. 1993. *Us}u>l al-Tarbi>yah al-Isla>mi>yah.* Beirut: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>

Arifin, HM. 1991. *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara

Daradjat, Zakiyah. 2003. *Ilmu Jiwa Agama.* Jakarta: PT. Bulan Bintang

Daradjat, Zakiyah. 2000. *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara

Daradjat, Zakiyah. 1989. *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental.* Jakarta: Gunung Agung

Departemen Agama RI, Dirjen Kelembagaan Islam. 2004. *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2004, RA. MI. MTs dan MA.* Jakarta: Depag

Djumbransah dan Karim Amrullah, Malik. 2007. *Pendidikan Islam.* Malang: UIN Malang Press

Hamalik, Oemar. 2007. *Manajemen Pengembangan Kurikulum.* Bandung: Remaja Rosdakarya

Idi, Abdullah. 2007.  *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik.* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Lestari, Tita. 2006. *Pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Mudjib, Abdul & Mudzakir, Jusuf. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta: Prananda Media

Muhaimin. 2009. *Rekonstruksi Pendidikan Islam, dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran.* Jakarta: Rajawali Press

Muhaimin. 2004. *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah.* Bandung: Remaja Rosdakarya

Muhaimin. 2009. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Nurgiyanto, Burhan. 1988. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum.* Yogyakarta: BPFEE

Ramayulis. 2011. *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta: Kalam Mulia

Sukmadinata,Nana Syaodih. 2010. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Syarif, A. Hamid. 1993. *Pengembangan Kurikulum.* Surabaya: Bina Ilmu

Tafsir, Ahmad. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam Perspektif Islam.* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

*Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003* *tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Bandung: Citra Unbara

*Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Semarang: CV. Aneka Ilmu

Winkel, W.S. 1996. *Psikologi Pengajaran.* Jakarta: Grasindo

Zuhairini dkk., 1997. *Sejarah Pendidikan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara Kerjasama Binbaga Depag

Zuhairini dkk., 1999. *Metodologi Penelitian Agama Islam.* Solo: Ramadani

Zuhairini, dkk., 1983. *Metodik Khusus Kependidikan Agama.* Surabaya: Usaha Nasional

1. Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 168 [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 23 [↑](#footnote-ref-2)
3. Winkel, W.S. *Psikologi Pengajaran* (Jakarta: Grasindo, 1996), h. 245 [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhaimin. *Rekonstruksi Pendidikan Islam, dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 51; Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam Perspektif Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), h. 32; Abdul Mudjib dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Prananda Media, 2006), h. 27 [↑](#footnote-ref-4)
5. Lestari, Tita. *Pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 112 [↑](#footnote-ref-5)
6. Darajat, Zakiyah. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 86 [↑](#footnote-ref-6)
7. Daradjat. *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h. 87 [↑](#footnote-ref-7)
8. Zuhairini dkk., *Metodologi Penelitian Agama Islam* (Solo: Ramadani, 1999), h. 10 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003), h. 57 [↑](#footnote-ref-9)
10. Departemen Agama RI. Dirjen Kelembagaan Islam. *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2004, RA. MI. MTs dan MA* (Jakarta: Depag, 2004), h. 22 [↑](#footnote-ref-10)
11. Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam,* 76. Lihat juga Sa*‘*i>d Isma>*‘*i>l *‘*Ali>, *Us}u>l al-Tarbi>yah al-Isla>mi>yah* (Beirut: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, 1993), h. 81 [↑](#footnote-ref-11)
12. Arifin, HM. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 528 [↑](#footnote-ref-12)
13. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Citra Unbara, 2003), h. 3 [↑](#footnote-ref-13)
14. Zuhairini, dkk., *Metodik Khusus Kependidikan Agama* (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), h. 27 [↑](#footnote-ref-14)
15. Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2003), h. 124 [↑](#footnote-ref-15)
16. Djumbransah dan Malik Karim Amrullah. *Pendidikan Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 63 [↑](#footnote-ref-16)
17. Djumbransah dan Malik Karim Amrullah. *Pendidikan Islam*…, h. 45 [↑](#footnote-ref-17)
18. Departemen Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemahannya*…, h. 49. Al-Qur’an surat al-Baqarah [2]: 201 [↑](#footnote-ref-18)
19. Zuhairini dkk., *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara kerjasama Binbaga Depag, 1997), h. 40 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 132 [↑](#footnote-ref-20)
21. Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010)*,* h. 161 [↑](#footnote-ref-21)
22. Nurgiyanto, Burhan. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* (Yogyakarta: BPFEE, 1988), h. 169 [↑](#footnote-ref-22)
23. Nurgiyanto, Burhan. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*…, h. 169 [↑](#footnote-ref-23)
24. Sukmadinata. *Pengembangan Kurikulum…,* h. 163 [↑](#footnote-ref-24)
25. Ahmad, H.M. dkk., *Pengembangan Kurikulum di Perguruan Tinggi* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 57 [↑](#footnote-ref-25)
26. Sukmadinata. *Pengembangan Kurikulum…,* h. 166 [↑](#footnote-ref-26)
27. Idi, Abdullah.  *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 159 [↑](#footnote-ref-27)
28. Sukmadinata. *Pengembangan Kurikulum…,* h. 167 [↑](#footnote-ref-28)
29. Dakir, H. *Perencanaan dan Pengembangan…,* h. 98 [↑](#footnote-ref-29)
30. Syarif, A. Hamid. *Pengembangan Kurikulum* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 97 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ahmad, HM. Dkk., *Pengembangan Kurikulum…,* h. 53 [↑](#footnote-ref-31)
32. Idi, Abdullah. *Pengembangan Kurikulum…,* h. 154 [↑](#footnote-ref-32)
33. Idi, Abdullah. *Pengembangan Kurikulum…,* h. 156 [↑](#footnote-ref-33)
34. Sukmadinata. *Pengembangan Kurikulum…,* h. 163 [↑](#footnote-ref-34)
35. Sukmadinata. *Pengembangan Kurikulum…,* h. 158 [↑](#footnote-ref-35)
36. Hamalik, Oemar. *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. 2, 2007), h. 106. [↑](#footnote-ref-36)
37. Sukmadinata. *Pengembangan Kurikulum…,* h. 159 [↑](#footnote-ref-37)
38. Hamalik. *Manajemen Pengembangan Kurikulum…*, h. 106 [↑](#footnote-ref-38)
39. Sukmadinata. *Pengembangan Kurikulum,* h. 159 [↑](#footnote-ref-39)
40. Hamalik. *Manajemen Pengembangan Kurikulum…*, h. 106 [↑](#footnote-ref-40)
41. Sukmadinata. *Pengembangan Kurikulum…,* h. 160 [↑](#footnote-ref-41)
42. Sukmadinata. *Pengembangan Kurikulum…,* h. 161 [↑](#footnote-ref-42)